

KESENJANGAN EKONOMI ANTAR DAERAH INDONESIA

Oleh: Revrisond Baswir

Pendahuluan

Kesenjangan ekonomi antardaerah sebenarnya bukan merupakan masalah baru bagi perekonomian Indonesia. Di samping banyak dipengaruhi oleh kondisi geografis dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah, masalah ini juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah. Pulau Jawa misalnya, di samping memiliki tanah yang subur, letaknya juga jauh lebih strategis dibandingkan pulau-pulau Indonesia lainnya. Tanahnya yang subur menyebabkan pulau ini menjadi penghasil beras utama bagi kepulauan Nusantara. Sedangkan posisinya yang berada di tengah-tengah, di antara pulau-pulau Indonesia yang lain, menyebabkan kota-kota pantai di pulau ini seperti Surabaya, Gresik, dan Jepara, lahir menjadi pelabuhan transit bagi perdagangan cengkeh dari Indonesia bagian timur, dan perdagangan lada dari Indonesia bagian barat.

Karena itulah, ketika kongsi-kongsi dagang Belanda (VOC) datang ke Indonesia, mereka lebih terpicu pada pulau Jawa dibandingkan pulau-pulau Indonesia lainnya. Dan sebagaimana dapat disaksikan kemudian, kehadiran VOC - yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda - ini pulalah yang antara lain banyak mempengaruhi tingkat perkembangan ekonomi pulau Jawa pada masa-masa berikutnya. Dibukanya perkebunan-perkebunan besar sejak awal abad ke 17, yang diikuti dengan pembangunan pabrik-pabrik telah membuat perekonomian pulau Jawa selangkah lebih maju dibandingkan pulau-pulau Indonesia lainnya. Kemudian dibangunnya jalan besar dari Anyer ke Panarukan oleh Daendels pada tahun 1808, menyebabkan perekonomian pulau Jawa menjadi semakin terbuka. Sedangkan dijadikannya kota Batavia sebagai pelabuhan utama oleh VOC, dan kemudian sebagai pusat pemerintahan oleh pemerintah Hindia Belanda, telah menyebabkan berkembangnya kota Jakarta sebagai kota utama di Indonesia.¹

¹ Mengenai sejarah perekonomian Indonesia ini lihat Prajudi Atmo-sudirdjo, Sejarah Ekonomi Indonesia. (Jakarta: Pradnya Para-mita, Cetakan ke-IV, 1983).

Contoh lain dari pengaruh kehadiran Belanda terhadap perkembangan ekonomi daerah-daerah Indonesia dapat pula dilihat pada kasus pulau Sumatra. Dibukanya perkebunan-perkebunan besar oleh kongsi-kongsi dagang Belanda di Sumatra Timur (kini Sumatra Utara) secara perlahan-lahan telah menyebabkan berkembangnya daerah ini menjadi propinsi utama di Sumatra.² Sedangkan kota Medan, yang semula tidak lebih besar dari pada Banda Aceh atau Palembang, kemudian menjadi kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

Setelah Indonesia merdeka, sampai dengan tahun 1965, secara keseluruhan keadaan perekonomian Indonesia yang diwarisi dari pemerintah Hindia Belanda di atas belum banyak berubah. Ketegangan-ketegangan politik yang berkepanjangan, termasuk di antaranya separatisme daerah³, serta perhatian pemerintah yang lebih banyak tertuju pada masalah-masalah politik ketika itu, memang tidak banyak pengaruhnya terhadap perkembangan perekonomian Indonesia pada umumnya dan perekonomian daerah pada khususnya. Sehingga, kalau boleh dikatakan demikian, dengan keadaan yang masih hampir sepenuhnya warisan pemerintah Hindia Belanda itulah kemudian pemerintah Orde Baru memulai pembangunan pada tahun 1969.⁴

Dalam tulisan ini, masalah kesenjangan ekonomi antardaerah ini akan dilihat dengan membandingkan keadaan dua periode, yaitu sebelum Pelita II dan setelah Pelita II. Dijadikannya Pelita II sebagai titik tolak adalah karena secara resmi pemerataan pembangunan antar daerah baru mulai mendapat perhatian sejak dimulainya Pelita II ini. Hal itu misalnya dapat dilihat pada dicantumkannya pemerataan ekonomi antardaerah sebagai salah satu dari delapan jalur pemerataan, dibahasnya pembangunan daerah secara tersendiri dalam GBHN, dan terutama dibentuknya Bappeda pada tahun 1974.

Keadaan Sebelum Pelita II

Tentu akan sangat menarik bila keadaan perekonomian daerah Indonesia digambarkan sejak dimulainya Pelita pada tahun 1969. Sayangnya data-data

² Mubyarto, *Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1983).

³ Lihat: Iwan Jaya Azis, "Pengembangan Pembangunan Daerah di Indonesia", dalam M. Arsyad Anwar (ed), *Permasalahan dan Prospek Ekonomi Indonesia 1985-1986*, Jakarta, Sinar Harapan, 1985.

⁴ Sritua Arief dan Adi Sasono, "Indonesia: Ketergantungan dan Keterbelakangan" (Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan, 1981).

mengenai keadaan perekonomian daerah Indonesia pada tahun pertama Pelita I ini tidak dapat dikemukakan di sini. Hal ini adalah karena studi yang menyeluruh mengenai keadaan perekonomian daerah Indonesia baru dilakukan sejak dibentuknya Kelompok Studi Pendapatan Daerah pada tahun 1970.⁵ Sedangkan sebelum tahun 1970, studi perekonomian daerah pada umumnya dilakukan secara daerah per daerah. Sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melihat keadaan perekonomian daerah-daerah Indonesia secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Kelompok Studi Pendapatan Daerah sebagaimana dikemukakan di atas,⁶ maka gambaran keadaan perekonomian daerah-daerah Indonesia pada tahun 1972 dapat dilihat pada distribusi Produk Domestik Bruto sebagai berikut: Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun 1972 ini tercatat sebesar Rp 4,097 milyar. Dari jumlah ini (lihat tabel 1) sekitar 22,3% berasal dari propinsi-propinsi di pulau Sumatra. Sedangkan yang berasal dari propinsi-propinsi di pulau Jawa tercatat sebesar 59%, Kalimantan 7,9%, Sulawesi 5,3%, dan pulau-pulau lainnya sekitar 5,7%.

Dari angka-angka di atas dapat disaksikan bahwa sebagian besar dari Produk Domestik Bruto Indonesia berasal dari propinsi-propinsi di pulau Jawa. Padahal luas wilayah ini tidak lebih dari sekitar 6,89% saja dari luas wilayah Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, keadaan perekonomian propinsi-propinsi di pulau Jawa memang jauh lebih maju daripada propinsi-propinsi di pulau-pulau lainnya. Kesimpulan ini didukung pula oleh fakta tingginya tingkat konsentrasi industri di wilayah ini.⁷ Dari seluruh perusahaan industri besar dan sedang yang beroperasi di Indonesia pada tahun 1971 (lihat tabel 2), sekitar 74,8% berada di wilayah ini. Sedangkan yang berlokasi di pulau Sumatra hanya sekitar 14,5%, Kalimantan 3,0%, Sulawesi 5,4%, dan pulau-pulau lainnya sekitar 2,3%.

Walaupun demikian, tentu tidak berarti bahwa tingkat pendapatan per kapita propinsi-propinsi di pulau Jawa juga jauh lebih tinggi daripada pendapatan per kapita propinsi-propinsi di pulau-pulau lainnya. Sebab sebagian besar penduduk Indonesia

⁵ Penjelasan mengenai Kelompok Studi Pendapatan Daerah ini lihat Alex Kerr, "Regional Income Estimation in Indonesia: Historical Development", *Ekonomi Keuangan Indonesia*, Vol. XXI, No. 3, September 1973.

⁶ Lihat Hendra Esmara: "Regional Income Disparities", *Bulletin of Indonesia Economic Studies*, Vol. XI, No. 1, 1975.

⁷ Hendra Esmara, *Ibid.*

juga terkonsentrasi di wilayah ini. Jumlah penduduk Indonesia yang menetap di pulau Jawa pada tahun 1972 tidak kurang dari 63,7%. Sedangkan yang menetap di pulau Sumatera hanya tercatat sekitar 17,6%, Kalimantan 4,3%, Sulawesi 7,1%, dan pulau-pulau lainnya sekitar 7,2%.

Akibat bentuk penyebaran penduduk seperti di atas, maka tingkat pendapatan per kapita propinsi-propinsi di Indonesia menjadi sangat bervariasi. Jawa Timur misalnya, yang berada pada urutan teratas dalam angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ternyata PDRB per kapitanya lebih rendah daripada Irian Jaya. Sebaliknya Kalimantan Timur yang berada di bawah Jakarta dalam angka PDRB, ternyata PDRB per kapitanya empat kali lebih besar daripada Jakarta.

Tapi tingkat pendapatan per kapita memang tidak dapat digunakan sebagai tolok ukur tinggi rendahnya tingkat perekonomian suatu wilayah.⁸ Bahwa pulau Jawa mampu menghidupi 63,7% dari seluruh penduduk Indonesia, dengan pendapatan per kapita sebesar Rp 31.147,00 (bandingkan dengan pulau-pulau lainnya), jelas menunjukkan lebih tingginya tingkat perekonomian wilayah ini dibandingkan pulau-pulau Indonesia yang lain. Lagi pula, tingkat konsentrasi industri yang amat tinggi, merupakan bukti lebih berkembangnya wilayah ini dibandingkan pulau-pulau Indonesia yang lain.

Tabel 1
Luas Wilayah, Penduduk, PDB dan PDB per Kapita
(tidak termasuk minyak bumi) propinsi-propinsi Indonesia
tahun 1972

| | Wilayah | | Penduduk | | PDB | | PDB Per kapita |
|---------------|---------|-------|----------|------|---------|------|-------------------|
| | km2 | % | .000 | % | Rp Juta | % | |
| DI Aceh | 55 392 | 2,88 | 2051 | 1,7 | 77 707 | 1,9 | 37 887 |
| Sum. Utara | 70 787 | 3,69 | 6 815 | 5,6 | 297 601 | 7,3 | 43 669 |
| Sum. Barat | 49 778 | 2,59 | 2 846 | 2,3 | 80 651 | 2,0 | 28 338 |
| Riau | 94 562 | 4,93 | 1690 | 1,4 | 148 519 | 3,6 | 87 881 |
| Jambi | 44 942 | 2,34 | 1037 | 0,9 | 44 930 | 1,1 | 43 327 |
| Bengkulu | 21 168 | 1,10 | 532 | 0,4 | 17 447 | 0,4 | 32 795 |
| Lampung | 33 307 | 1,74 | 2 921 | 2,4 | 90 476 | 2,2 | 30 974 |
| Sum. Selatan | 103 688 | 5,40 | 3 520 | 2,9 | 155 826 | 3,8 | 44 269 |
| SUMATERA | 473 606 | 24,67 | 21412 | 17,6 | 913 157 | 22,3 | 42 647 |
| DKI Jakarta | 590 | 0,03 | 4 791 | 3,9 | 261 437 | 6,4 | 54 568 |
| Jawa Barat | 46 300 | 2,41 | 22 086 | 18,1 | 586 212 | 14,3 | 26 542 |
| Jawa Tengah | 34 206 | 1,78 | 22 271 | 18,3 | 565 448 | 13,8 | 25 389 |
| DI Yogyakarta | 3 169 | 0,17 | 2 517 | 2,1 | 59 224 | 1,4 | 23 530 |

⁸ Lihat Hendra Esmara, *Ibid*, dan lihat pula Sadono Sukirno, "Eko-nomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebi-jaksanaan, (Tanpa kota, Bima Grafika, Cetakan ke-3, 1982).

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------|--------|---------|--------|-----------|--------|--------|
| Jawa Timur | 47 922 | 2,50 | 25 935 | 21,3 | 944 703 | 23,1 | 36 426 |
| JAWA | 132187 | 6,89 | 77 600 | 63,7 | 2 417 024 | 58,9 | 31 147 |
| Bali | 5 561 | 0,29 | 2 158 | 1,8 | 64 015 | 1,6 | 29 664 |
| Nusa T. Barat | 20117 | 1,05 | 2 246 | 1,8 | 40 383 | 1,0 | 17 980 |
| Nusa T. Timur | 47 876 | 2,49 | 2 332 | 1,9 | 45 612 | 1,1 | 19 559 |
| Timor Timur | 14 874 | 0,78 | - | - | | | |
| NUSA TENG- GARA | 88 488 | 4,61 | 6 736 | 5,5 | 150 010 | 3,7 | 22 270 |
| Kal. Barat | 146 760 | 7,65 | 2 070 | 1,7 | 48 357 | 1,2 | 23 361 |
| Kal. Tengah | 152 600 | 7,95 | 724 | 0,6 | 45 896 | 1,1 | 63 393 |
| Kal. Selatan | 37 660 | 1,96 | 1 723 | 1,4 | 62 057 | 1,5 | 36 017 |
| Kal. Timur | 202 440 | 10,55 | 755 | 0,6 | 167 268 | 4,1 | 221446 |
| KALIMAN- TAN | 539 460 | 28,11 | 5 272 | 4,3 | 323 578 | 7,9 | 61 376 |
| Sul. Utara | 19 023 | 0,99 | 1 759 | 1,4 | 43 890 | 1,1 | 24 952 |
| | 69 726 | 3,63 | 945 | 0,8 | 23 385 | 0,6 | 24 746 |
| Sul. Selatan | 72 781 | 3,79 | 5 262 | 4,3 | 125 251 | 3,1 | 23 803 |
| Sul. Tenggara | 27 686 | 1,44 | 732 | 0,6 | 20 316 | 0,5 | 27 754 |
| SULAWESI | 189 216 | 9,85 | 8 698 | 7,1 | 212 842 | 5,2 | 24 470 |
| Maluku | 74 505 | 3,88 | 1 124 | 0,9 | 46 228 | 1,1 | 41 128 |
| Irian Jaya | 421 981 | 21,99 | 941 | 0,8 | 34 873 | 0,9 | 37 021 |
| MALUKU+ IRJA | 496 486 | 25,87 | 2 065 | 1,7 | 81 101 | 2,0 | 39 274 |
| INDONESIA | 1 919 443 | 100,00 | 121 783 | 100,00 | 4 097 676 | 100,00 | 33 647 |

Tabel 2
Distribusi Perusahaan Manufaktur Ukuran Besar dan Sedang,
Tenaga Kerja dan Nilai Tambah Berdasarkan Wilayah Utama
Tahun 1971 (persentase)

| | Kelompok Wilayah | | | | | Jumlah |
|-----------------------------------|------------------|---------|------------|----------|------------|--------|
| | Jawa | Sumatra | Kalimantan | Sulawesi | Pulau lain | |
| Penduduk 1971 | 63,8 | 17,5 | 4,3 | 7,2 | 7,2 | 100,0 |
| <i>Perusahaan</i> | | | | | | |
| Besar | 82,7 | 12,6 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 100,0 |
| Sedang | 71,9 | 16,0 | 3,7 | 5,9 | 2,5 | 100,0 |
| Jumlah | 74,8 | 14,5 | 3,0 | 5,4 | 2,3 | 100,0 |
| <i>Makanan dan Tem- bakau</i> | | | | | | |
| | 71,4 | 13,5 | 3,8 | 8,5 | 2,8 | 100,00 |
| <i>Tekstil</i> | 95,6 | 2,6 | 0,1 | 0,5 | 1,2 | 100,00 |
| <i>Kayu dll.</i> | 42,1 | 45,2 | 6,9 | 3,2 | 2,6 | 100,00 |
| <i>Karet dll.</i> | 67,6 | 24,8 | 5,6 | 0,8 | 1,2 | 100,00 |
| <i>Lain-lain</i> | 74,8 | 15,5 | 1,7 | 5,5 | 2,5 | 100,00 |
| <i>Tenaga Kerja :</i> | | | | | | |
| Besar | 87,3 | 10,0 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 100,0 |
| Sedang | 78,5 | 12,2 | 3,0 | 3,8 | 2,5 | 100,0 |
| Jumlah | 85,1 | 10,6 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 100,0 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|------|------|-----|-----|-------|
| Makanan dan Tembakau | 89,6 | 7,0 | 0,6 | 1,4 | 1,4 | 100,0 |
| Tekstil | 94,2 | 3,2 | 0,1 | 0,6 | 1,9 | 100,0 |
| Kayu dll | 41,6 | 33,0 | 15,7 | 2,6 | 7,1 | 100,0 |
| Karet dll | 72,2 | 23,5 | 3,2 | 1,0 | 0,1 | 100,0 |
| Lain-lain | 82,7 | 10,6 | 0,6 | 4,8 | 1,3 | 100,0 |
| <i>Nilai Tambah :</i> | | | | | | |
| Makanan dan Tembakau | 86,1 | 11,6 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
| Tekstil | 95,2 | 3,1 | - | 0,3 | 1,4 | 100,0 |
| Kayu dll. | 42,4 | 33,3 | 16,2 | 2,5 | 5,6 | 100,0 |
| Karet dll | 60,3 | 35,7 | 3,8 | 0,2 | - | 100,0 |
| Lain-lain | 84,7 | 11,0 | 0,4 | 3,6 | 0,3 | 100,0 |
| Jumlah | 80,3 | 16,6 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 100,0 |

Sumber: IB, 2 dan 3, Biro Pusat Statistik, 1973 dan 1974, dikutip dari Hendra Asmara, *ibid.*, hal. 53.

Dengan demikian, dengan angka-angka dan dasar pemikiran sebagaimana dikemukakan di atas, dapatlah dinyatakan bahwa masalah kesenjangan ekonomi antardaerah yang dihadapi Indonesia - terutama antara pulau Jawa dengan pulau-pulau Indonesia lainnya, memang cukup serius. Lebih-lebih masalah ini disertai pula oleh masalah penyebaran penduduk yang juga tidak merata. Bagi pulau Jawa, jumlah penduduk yang berlebihan telah menyebabkan timbulnya berbagai masalah ekonomi dan sosial seperti masalah penyediaan peluang kerja, kian menyempitnya lahan pertanian, masalah penyediaan fasilitas pendidikan, masalah penyediaan fasilitas kesehatan, masalah kepadatan lalu-lintas, dan bahkan masalah pencemaran lingkungan.

Bagi pulau-pulau Indonesia yang lain, jumlah penduduk yang terbatas telah menyebabkan tidak terolahnya berbagai potensi ekonomi yang dimiliki oleh wilayah yang bersangkutan. Khusus bagi daerah-daerah yang berbatasan secara langsung dengan negara lain, seperti kepulauan Riau, sebagian Kalimantan dan Irian Jaya, yang biasanya ditandai dengan tingkat kemakmuran penduduknya yang rendah, jelas merupakan sesuatu yang rawan ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan sosial. Sedangkan bagi pembangunan nasional secara keseluruhan, menumpuknya berbagai masalah ekonomi dan sosial di pulau Jawa, akan menyebabkan semakin terorientasinya pelaksanaan pembangunan ke wilayah ini. Dengan demikian makin

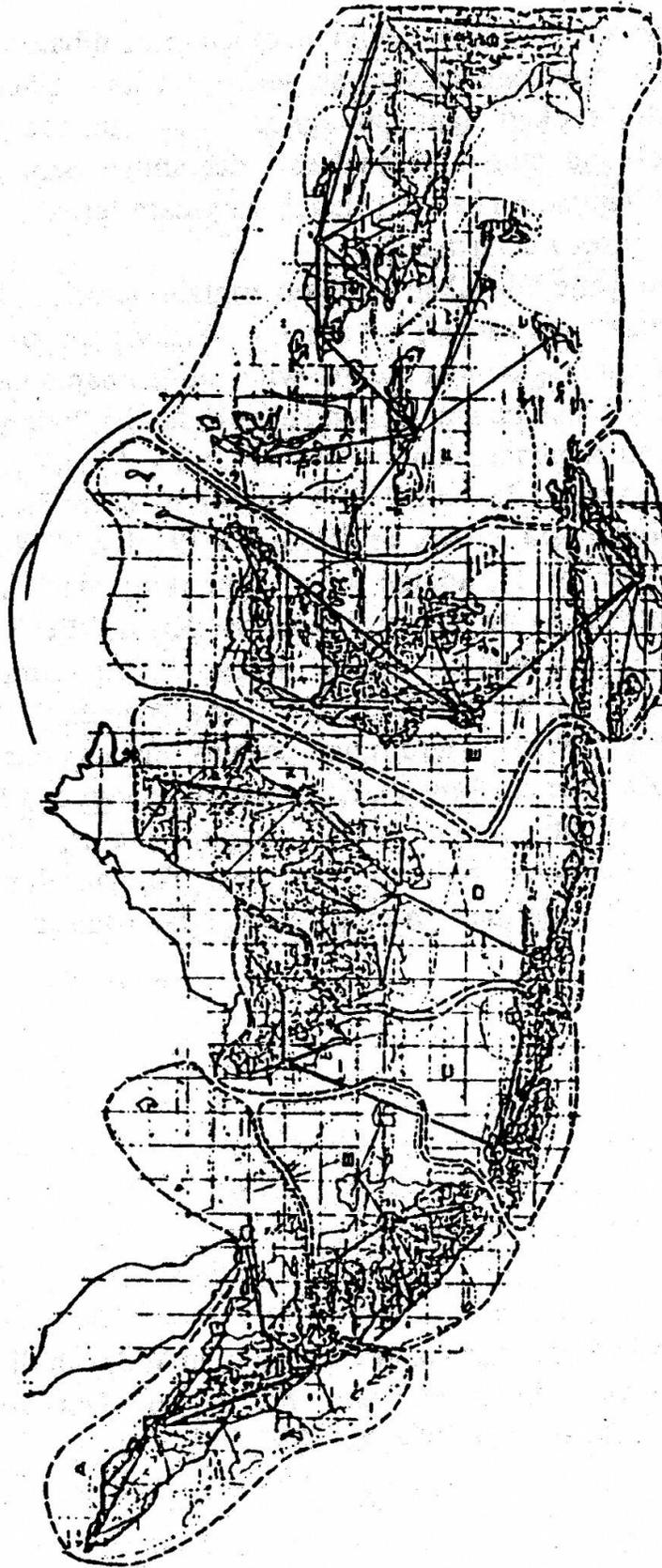
memperburuk masalah kesenjangan ekonomi antardaerah yang dihadapi oleh Indonesia.

Beberapa Tindakan

Sebagaimana dinyatakan di muka, salah satu tindakan yang dilakukan pemerintah menyusul diangkatnya pemerataan pembangunan antardaerah sebagai salah satu prioritas pembangunan adalah dibentuknya Bappeda pada tahun 1974. Tujuan pembentukan badan ini adalah untuk membantu Gubernur dalam melakukan perencanaan, pengawasan dan pengkoordinasian pembangunan daerah.⁹ Dengan demikian, di samping diharapkan mampu menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya, Bappeda juga diharapkan dapat mengkoordinasikan dan mengawasi proyek-proyek sektoral yang dilaksanakan di daerahnya. Sehingga pembangunan daerah diharapkan akan terselenggara secara terpadu serta sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerah.

Tindakan lain yang dilakukan oleh pemerintah - terutama Departemen Pekerjaan Umum, dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan daerah adalah dikembangkannya konsep wilayah pembangunan. Menurut konsep wilayah pembangunan ini, dalam Pelita II dan III, Indonesia terbagi ke dalam 4 wilayah pembangunan utama (WPU) dan 10 wilayah pengembangan (WP). Akan tetapi dalam Pelita IV konsep ini disempurnakan lebih lanjut, sehingga Indonesia terbagi ke dalam 6 WPU dan 38 WP. Keenam WPU itu (lihat gambar 1), adalah sebagai berikut: WPU A meliputi propinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Riau. WPU B terdiri dari propinsi-propinsi Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu dan Lampung. WPU C meliputi propinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Kalimantan Barat. WPU D terdiri dari propinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. WPU E meliputi propinsi Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Dan WPU F meliputi propinsi Maluku dan Irian Jaya.

⁹ Syafrizal, "Pola Kebijaksanaan Pembangunan Wilayah di Indonesia: Suatu Gagasan", *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. XXXJJ, No. 3, September 1984, hal. 357-383.



INDONESIA
Gambar 1

Pada masing-masing WPU di atas, kecuali WPU F, terdapat sebuah pusat pengembangan yang diharapkan dapat berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan wilayah yang bersangkutan. Di samping itu, ia juga diharapkan dapat menyebarluaskan pembangunan ke seluruh bagian wilayahnya, sehingga tidak terkonsentrasi di kota-kota besar tertentu saja. Adapun kelima pusat pengembangan itu adalah: Medan untuk WPU A, Palembang untuk WPU B, DKI Jakarta untuk WPU C, Surabaya untuk WPU D, dan Ujung Pandang untuk WPU E.¹⁰

Sedangkan dari segi anggaran, tindakan yang dilakukan dalam mendorong pelaksanaan pembangunan di daerah adalah dengan memper-besar alokasi anggaran pembangunan kepada daerah. Bila dalam Pelita I hampir seluruh bantuan pemerintah pusat kepada daerah diberikan dalam bentuk subsidi rutin, maka sejak Pelita II jumlah subsidi pembangunan mulai diperbesar. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3, proporsi subsidi pembangunan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Bila pada tahun 1973/74 jumlahnya hanya sekitar 1,8% dari seluruh subsidi yang diterima daerah, maka pada tahun 1978/79 dan 1980/81 proporsinya meningkat menjadi 13,5% dan 17,5%.¹¹

¹⁰ Lihat Syafrizal, *Ibid*, dan lihat pula Iwan Jaya Azis, "Pengembangan Pembangunan Daerah di Indonesia", dalam Moh. Arsyad Anwar, *op.cit*.

¹¹ Alfian Lains, "Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru", *Prisma*, No. 4, April 1985, hal. 40-57.

Tabel 3 Subsidi Rutin dan Subsidi Pembangunan pada Propinsi-propinsi di Indonesia 1973/1974 -1980/1981 (dalam persen)

| Provinsi | 1973/1974 | | 1978/1979 | | 1980/1981 | |
|------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| | SR | SP | SR | SP | SR | SP |
| 1. DI Aceh | 98,8 | 1,2 | 93,2 | 6,8 | 93,6 | 16,4 |
| 2. Sumatera Utara | 100,0 | | 81,2 | 18,8 | 85,7 | 14,3 |
| 3. Sumatera Barat | 100,0 | - | 85,5 | 14,5 | 83,5 | 16,5 |
| 4. Riau | 100,0 | | 100,0 | - | 60,7 | 39,3 |
| 5. Jambi | 100,0 | - | 60,4 | 39,6 | 57,3 | 42,7 |
| 6. Sumatera Selatan | 100,0 | - | 66,3 | 33,7 | 71,0 | 29,0 |
| 7. Bengkulu | 100,0 | - | 63,7 | 36,3 | 55,7 | 44,3 |
| 8. Lampung | 100,0 | - | 74,1 | 25,9 | 75,5 | 24,5 |
| 9. DKI Jakarta | 100,0 | "- | 89,4 | 10,5 | 89,1 | 10,9 |
| 10. Jawa Barat | 97,4 | 2,6 | 92,6 | 7,4 | 93,5 | 6,5 |
| 11. Jawa Tengah | 100,0 | | 92,9 | 7,1 | 91,1 | 8,9 |
| 12. DI Yogyakarta | 100,0 | - | 87,3 | 12,7 | 85,1 | 14,9 |
| 13. Jawa Timur | na | na | 91,3 | 8,7 | 94,2 | 5,8 |
| 14. Bali | 100,0 | - | 85,6 | 14,4 | 80,1 | 19,9 |
| 15. NusaT. Barat | 97,2 | 2,8 | 81,6 | 18,4 | 78,6 | 21,4 |
| 16. NusaT. Timur | 100,0 | . | 88,3 | 11,7 | 81,5 | 18,5 |
| 17. Kalimantan Barat | na | na | 74,3 | 25,7 | 72,4 | 17,6 |
| 18. Kalimantan Selatan | 100,0 | - | 83,4 | 16,5 | 80,7 | 19,3 |
| 19. Kalimantan Tengah | 100,0 | - | 74,3 | 25,7 | 39,1 | 60,9 |
| 20. Kalimantan Timur | 100,0 | - | 74,4 | 25,6 | 27,6 | 72,4 |
| 21. Sulawesi Utara | 100,0 | | 88,8 | 11,2 | 83,2 | 16,8 |
| 22. Sulawesi Tengah | 100,0 | | 79,5 | 20,5 | 67,2 | 32,8 |
| 23. Sulawesi Tenggara | 100,0 | - | 65,7 | 34,3 | 66,5 | 33,5 |
| 24. Sulawesi Selatan | na | na | 86,3 | 13,7 | 86,7 | 13,3 |
| 25. Maluku | 64,3 | 35,7 | 80,4 | 19,6 | 59,8 | 40,2 |
| 26. Irian Jaya | na | na | 90,5 | 9,5 | 86,9 | 14,1 |
| Total | 98,2 | 1,8 | 86,5 | 13,5 | 82,5 | 17,5 |

SR = Subsidi Rutin SP = Subsidi Pembangunan

Sumber : Alfian Lains, Pendapatan Daerah dalam Ekonomi Orde Baru, Prisma No. 4, April 1985, hal. 50.

Dan karena pemberian subsidi pembangunan di atas dilakukan melalui proyek-proyek Inpres, maka sejalan dengan makin membesarnya proporsi subsidi pembangunan ini, menyebabkan makin beragam pula jenis proyek Inpres yang dilakukan oleh pemerintah. Bila selama Pelita I hanya terdapat 3 jenis proyek Inpres (Inpres Desa, Inpres Dati II dan Inpres Sekolah Dasar), maka dalam Pelita II dan III diperkenalkan 5 proyek Inpres lagi, yaitu Inpres Dati I, Inpres Pelayanan Kesehatan,

Inpres Penghijauan, Inpres Pembangunan Pasar dan Inpres Pembangunan Jalan.¹² Sedangkan nilainya dari Rp 90 milyar dalam Pelita I meningkat menjadi Rp 5 triliun dalam Pelita III.¹³

Dengan berbagai tindakan di atas dapat disaksikan bahwa sejak Pelita II pemerintah memang menaruh perhatian yang cukup serius terhadap usaha pemerataan pembangunan antar daerah. Lebih-lebih sejak diangkatnya logi pemerataan pada urutan pertama Pelita III, praktis pemerataan pembangunan antardaerah makin menempati urutan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Masalahnya kemudian adalah, bagaimanakah hasil yang dicapai?

Keadaan Setelah Pelita II

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4, jawaban atas pertanyaan di atas nampaknya tidak terlalu menggembirakan. Dari seluruh PDB Indonesia sebesar Rp 14,869 milyar pada tahun 1980, sebagian besar ternyata tetap berasal dari propinsi-propinsi di pulau Jawa. Jumlah yang berasal dari propinsi-propinsi di pulau ini adalah sekitar 60,2%, atau meningkat dari 58,9% pada tahun 1972. Sebaliknya yang berasal dari propinsi-propinsi di pulau Sumatra dan Kalimantan justru menurun dari 22,3% dan 7,9% pada tahun 1972, menjadi hanya 20,6% dan 6,2% pada tahun 1980. Sedangkan yang berasal dari propinsi-propinsi di pulau Sulawesi dan pulau-pulau lainnya rata-rata meningkat sedikit, yaitu dari 5,2% dan 3,7% pada tahun 1972 menjadi 6,4% dan 6,7% pada tahun 1980.

¹² Atar Sibero, "Peningkatan Kemampuan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah", Prisma, No. 12, Desember 1985, hal. 3-14.

¹³ Kompas, 9 Januari 1986

| | Wilayah | | Penduduk | | PDB | | PDB per kapita |
|-----------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|----------------|
| | km2 | % | .000 | % | Rp Juta | % | |
| DI Aceh | 55 392 | 2,88 | 2 611 | 1,8 | 254 110 | 1,7 | 99 720 |
| Sum. Utara | 70 787 | 3,69 | 8 361 | 5,7 | 1 080 020 | 7,3 | 130 470 |
| Sum. Barat | 49 778 | 2,59 | 3 407 | 2,3 | 279 850 | 1,9 | 82 160 |
| Riau | 94 562 | 4,93 | 2 169 | 1,5 | 231 800 | 1,6 | 109 300 |
| Jambi | 44 942 | 2,34 | 1 447 | 1,0 | 135 340 | 0,9 | 93 730 |
| Bengkulu | 21 168 | 1,10 | 768 | 0,5 | 61 220 | 0,4 | 80 670 |
| Lampung | 33 307 | 1,74 | 4 625 | 3,1 | 340 310 | 2,2 | 82 110 |
| Sum. Selatan | 103 688 | 5,40 | 4 630 | 3,1 | 662 430 | 4,5 | 145 320 |
| SUMATERA | 473 606 | 24,67 | 28 016 | 19,0 | 3 045 080 | 20,6 | 108 689 |
| DKI Jakarta | 590 | 0,03 | 6 503 | 4,4 | 1 686 380 | 11,3 | 264 620 |
| Jawa Barat | 46 300 | 2,41 | 27 454 | 18,6 | 2 590 080 | 17,4 | 95 200 |
| Jawa Tengah | 34 206 | 1,78 | 25 373 | 17,2 | 1 717 120 | 11,5 | 69 090 |
| DI Yogyakarta | 3 169 | 0,17 | 2 751 | 1,9 | 187 320 | 1,3 | 67 860 |
| Jawa Timur | 47 922 | 2,50 | 29 189 | 19,8 | 2 774 710 | 18,7 | 95 530 |
| JAWA | 132 187 | 6,89 | 91 230 | 61,9 | 8 955 610 | 60,2 | 98 122 |
| Bali | 5 561 | 0,29 | 2 470 | 1,7 | 275 480 | 1,8 | 112 170 |
| Nusa T. Barat | 20 117 | 1,05 | 2 725 | 1,9 | 144 100 | 1,0 | 53 330 |
| Nusa T. Timur | 47 876 | 2,49 | 2 737 | 1,9 | 144 730 | 1,0 | 53 650 |
| Timor Timur | 14 874 | 0,78 | 555 | 0,4 | - | - | - |
| NUSA TENGGARA | 88 488 | 4,61 | 8 487 | 5,8 | 564 310 | 3,8 | 66 491 |
| Kal. Barat | 146 760 | 7,65 | 2 486 | 1,7 | 260 950 | 1,8 | 105 770 |
| Kal. Tengah | 152 600 | 7,95 | 954 | 0,7 | 129 630 | 0,9 | 140 080 |
| Kal. Selatan | 37 660 | 1,96 | 2 065 | 1,4 | 176 230 | 1,2 | 85 360 |
| Kal. Timur | 202 440 | 10,55 | 1 218 | 0,8 | 353 230 | 2,4 | 301 470 |
| KALIMANTAN | 539 460 | 28,11 | 6 723 | 4,6 | 920 040 | 6,2 | 136 850 |
| Sul. Utara | 19 023 | 0,99 | 2 115 | 1,5 | 241 590 | 1,6 | 119 330 |
| Sul. Tengah | 69 726 | 3,63 | 1 290 | 0,9 | 93 770 | 0,6 | 75 470 |
| Sul. Selatan | 72 781 | 3,79 | 6 062 | 4,1 | 546 540 | 3,7 | 92 210 |
| Sul. Tenggara | 27 686 | 1,44 | 942 | 0,6 | 67 130 | 0,5 | 75 910 |
| SULAWESI | 189 216 | 9,85 | 10 410 | 7,1 | 949 030 | 6,4 | 91 165 |
| Maluku | 74 505 | 3,88 | 1 411 | 1,0 | 165 140 | 1,1 | 118 920 |
| Irian Jaya | 421 981 | 21,99 | 1 174 | 0,8 | 269 820 | 1,8 | 229 860 |
| MALUKU + IRIJA | 496 486 | 25,87 | 2 585 | 1,8 | 434 960 | 2,9 | 168 263 |
| INDONESIA | 1 919 443 | 100,0 | 147 490 | 100,0 | 14 869 030 | 100,0 | 100 814 |

Berdasarkan angka-angka di atas maka dapat disaksikan bahwa secara keseluruhan keadaan belum banyak berubah. Bahkan, dengan meningkatnya jumlah PDB yang berasal dari propinsi-propinsi di pulau Jawa, berarti tingkat kesenjangan ekonomi antardaerah yang dihadapi Indonesia, khususnya antara pulau Jawa dengan pulau-pulau Indonesia lainnya, telah menjadi makin serius. Kenyataan di atas didukung pula oleh fakta makin tingginya tingkat konsentrasi industri di pulau Jawa. Dari seluruh perusahaan industri besar dan sedang yang beroperasi di Indonesia pada tahun 1982 (lihat tabel 5), jumlah yang berlokasi di pulau Jawa telah meningkat dari

74,8% pada tahun 1971 menjadi 81,9% pada tahun 1982. Walaupun yang berlokasi di pulau Kalimantan dan pulau-pulau lainnya telah meningkat sedikit, masing-masing dari 3,0% dan 2,3% pada tahun 1971 menjadi 3,6% dan 2,8% pada tahun 1982, namun yang berlokasi di pulau Sumatra dan Sulawesi telah menurun secara drastis, yaitu dari 14,5% dan 5,4% pada tahun 1971, menjadi hanya 9,3% dan 2,3% pada tahun 1982.

Tabel 5
Perusahaan Manufaktur Ukuran Besar Dan Sedang
Serta Tenaga Kerja Berdasarkan Wilayah Utama
Tahun 1971 - 1982 (persentase)

| | Penduduk | Perusahaan | | Tenaga Kerja | |
|-------------|----------|------------|------|--------------|------|
| | 1982* | 1971 | 1982 | 1971 | 1982 |
| Pulau Jawa | 61,5 | 74,8 | 81,9 | 85,1 | 84,3 |
| Pulau lain: | 38,5 | 25,2 | 18,1 | 14,9 | 15,7 |
| Sumatera | 19,4 | 14,5 | 9,3 | 10,6 | 8,6 |
| Kalimantan | 4,6 | 3,0 | 3,6 | 1,4 | 4,8 |
| Sulawesi | 7,0 | 5,4 | 2,3 | 1,5 | 1,2 |
| Lain-lain | 7,5 | 2,3 | 2,8 | 1,9 | 1,2 |

Proyeksi:

Sumber : Statistik Industri 1971, opcit

Statistik Industri 1983, Hasil Pengolahan Data Perusahaan Industri Besar dan Sedang Bagian I, BPS 1985.

Namun demikian, bila ditelusuri lebih jauh, kenyataan sebagaimana dikemukakan di atas sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Proyek-proyek Inpres yang dilakukan oleh pemerintah misalnya, sebagian besar memang berada di pulau Jawa. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 6, dari seluruh Inpres Dati I dan Dati II yang dilakukan pemerintah dalam periode Pelita II, 48,34% di antaranya berada di pulau Jawa. Sedangkan yang berada di pulau Sumatra hanya tercatat sekitar 26,94%, Kalimantan 6,9%, Sulawesi 8,43%, dan pulau-pulau lain sekitar 9,39%. Walaupun dalam periode Pelita III jumlah Inpres Dati I dan II yang berada di pulau Jawa turun menjadi 38,44%, namun dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain pulau Jawa masih tetap yang paling besar. Inpres Dati I dan II yang berada di pulau Sumatra dalam periode Pelita III ini tercatat sekitar 25,82%, Kalimantan 9,81%, Sulawesi 10,82% dan pulau-pulau lain sekitar 15,11%.

Demikian pula halnya dengan investasi-investasi PMA dan PMDN. Dari seluruh investasi PMA dan PMDN yang disetujui pemerintah sejak Pelita I hingga Pelita III (lihat tabel 7), yang memilih lokasi di pulau Jawa tercatat sekitar 58,63% dan 61,73%. Dengan demikian yang memilih lokasi di pulau-pulau Indonesia lainnya hanyalah sekitar 41,37% dan 38,27%. Yang cukup mengejutkan adalah bahwa peningkatan jumlah investasi PMA di pulau Jawa justru terjadi dalam periode Pelita III. Bila dalam periode Pelita I dan II jumlah investasi PMA yang memilih lokasi di pulau Jawa hanya meliputi sekitar 48,76%, maka dalam periode Pelita III terjadi lonjakan menjadi sekitar 73,16%. Bila yang memilih lokasi di pulau-pulau Indonesia lainnya pada umumnya berbentuk industri primer, maka yang berada di pulau Jawa sebagian besar justru adalah yang bergerak dalam bidang industri manufaktur.¹⁴ Hal yang terakhir inilah antara lain yang menyebabkan semakin tingginya tingkat konsentrasi industri di pulau Jawa.

Tabel 6
Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Untuk Dati I dan
Dati II Per Propinsi (Sebagai Persen Dari Total)

| | Repelita II | | | Repelita III | | |
|--------------------|-------------|---------|--------|--------------|---------|--------|
| | Dati I | Dati II | Jumlah | Dati I | Dati II | Jumlah |
| DI Aceh | 2,41 | 1,57 | 2,00 | 3,38 | 1,87 | 2,74 |
| Sumatera Utara | 10,87 | 5,45 | 8,18 | 5,14 | 5,86 | 5,44 |
| Sumatera Barat | 2,61 | 2,24 | 2,43 | 3,37 | 2,56 | 3,03 |
| Riau | 3,50 | 1,27 | 2,40 | 3,53 | 1,44 | 2,64 |
| Jambi | 2,75 | 0,76 | 1,76 | 3,44 | 0,93 | 2,37 |
| Sumater Selatan | 9,05 | 2,61 | 5,86 | 4,98 | 2,98 | 4,13 |
| Bengkulu | 1,85 | 0,44 | 1,15 | 3,35 | 0,54 | 2,15 |
| Lampung | 4,06 | 2,25 | 3,16 | 3,61 | 2,92 | 3,32 |
| DKI Jakarta | 3,36 | 3,60 | 3,48 | 3,43 | 4,21 | 4,76 |
| Jawa Barat | 7,82 | 16,42 | 12,08 | 4,95 | 18,03 | 10,51 |
| Jawa Tengah | 8,19 | 23,29 | 15,67 | 4,94 | 17,15 | 10,13 |
| DI Yogyakarta | 1,86 | 1,77 | 1,82 | 3,33 | 1,85 | 2,70 |
| Jawa Timur | 10,68 | 20,00 | 15,29 | 5,12 | 19,75 | 11,34 |
| Kalimantan Barat | 3,50 | 1,53 | 2,53 | 3,55 | 1,63 | 2,73 |
| Kalimantan Tengah | 1,86 | 0,57 | 1,22 | 3,35 | 0,73 | 2,24 |
| Kalimantan Selatan | 2,03 | 1,28 | 1,66 | 3,37 | 1,37 | 2,52 |
| Kalimantan Timur | 2,30 | 0,67 | 1,49 | 3,36 | 0,92 | 2,32 |
| Sulawesi Utara | 2,10 | 1,34 | 1,72 | 3,35 | 1,40 | 2,52 |
| Sulawesi Tengah | 2,10 | 0,75 | 1,43 | 3,34 | 0,83 | 2,28 |

¹⁴ Lihat Iwan Jaya Azis, "Pembangunan Daerah dan Aspek Alokasi Investasi Antardaerah", Prisma, No. 5, Mei 1985, hal. 3-21.

| | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sulawesi Selatan | 4,14 | 3,95 | 4,05 | 3,65 | 4,12 | 3,85 |
| Sulawesi Tenggara | 1,89 | 0,57 | 1,23 | 3,33. | 0,60 | 2,17 |
| Bali | 1,91 | 1,63 | 1,77 | 3,35 | 1,68 | 2,64 |
| Nusa Tenggara Barat | 1,96 | 1,71 | 1,84 | 3,34 | 1,81 | 2,69 |
| Nusa Tenggara Timur | 2,36 | 2,41 | 2,39 | 3,36 | 1,81 | 2,70 |
| Maluku | 1,92 | 0,84 | 1,39 | 3,37 | 0,94 | 2,34 |
| Irian Jaya | 1,81 | 0,72 | 1,27 | 3,37 | 0,94 | 2,34 |
| Timor Timur | 1,10 | 0,38 | 0,74 | 3,33 | 1,13 | 2,40 |
| Indonesia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : Lampiran Pidato Presiden, Agustus 1984/1985

Tabel 7

Nilai PMA dan PMDN Yang Telah Disetujui Pemerintah Dalam Repelita I, II dan

| No. | Provinsi | PMA | | PMDN | |
|-----|---------------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | Juta US \$ | % | Juta Rp. | % |
| 1. | Aceh | 947.1 | 7,58 | 383 227 | 2,57 |
| 2. | Sumatera Utara | 1 115.1 | 8,92 | 671 005 | 4,49 |
| 3. | Sumatera Barat | 70.8 | 0,57 | 114119 | 0,76 |
| 4. | Riau | 441.8 | 3,30 | 243 048 | 1,63 |
| 5. | Jambi | 30.9 | 0,25 | 83 586 | 0,56 |
| 6. | Bengkulu | - | - | 21 233 | 0,14 |
| 7. | Lampung | 90.4 | 0,72 | 212 974 | 1,43 |
| 8. | Sumatera Selatan | 79.1 | 0,63 | 829 967 | 5,56 |
| 9. | DKI Jakarta | 3 158.3 | 25,27 | 2 211443 | 14,80 |
| 10. | Jawa Barat | 3 407.2 | 27,26 | 3 819 974 | 25,57 |
| 11. | Jawa Tengah | 231.3 | 1,85 | 1 722 933 | 11,53 |
| 12. | DIYogyakarta | 2.6 | 0,02 | 19 036 | 0,32 |
| 13. | Jawa Timur | 527.0 | 4,22 | 1 421 001 | 9,51 |
| 14. | Kalimantan Barat | 19.0 | 0,15 | 621 612 | 4,16 |
| 15. | Kalimantan Tengah | 97.1 | 0,78 | 289 650 | 1,94 |
| 16. | Kalimantan Selatan | 95.5 | 0,76 | 155 130 | 1,04 |
| 17. | Kalimantan Timur | 389.0 | 3,11 | 1 016 168 | 6,80 |
| 18. | Sulawesi Utara | 98.1 | 0,79 | 83 924 | 0,36 |
| 19. | Sulawesi Tengah | 11.4 | 0,09 | 190 491 | 1,28 |
| 20. | Sulawesi Selatan | 112.1 | 0,90 | 187 481 | 1,25 |
| 21. | Sulawesi Tenggara | 66.8 | 0,53 | 66 639 | 0,41 |
| 22. | Bali | 49.2 | 0,39 | 103 995 | 0,70 |
| 23. | Nusa Tenggara Barat | 19.0 | 0,15 | 104 721 | 0,70 |
| 24. | Nusa Tenggara Timur | 35.4 | 0,28 | 44 014 | 0,29 |
| 25. | Maluku | 142.8 | 1,14 | 175 415 | 1,17 |
| 26. | Irian Jaya | 326.0 | 2,61 | 154 529 | 1,03 |
| 27. | Timor-Timur | - | - | - | - |
| | Beberapa Daerah Tingkat I | 963.4. | 7,71 | - | - |
| | Indonesia | 12 496.4 | 100,00 | 14 490 004 | 100,00 |

Sumber : Lampiran Pidato Presiden, Agustus 1984/1985

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disaksikan bahwa untuk periods 1972-1980, kesenjangan ekonomi antara pulau Jawa dengan pulau-pulau Indonesia lainnya ternyata telah menjadi semakin serius. Baik dilihat dari segi tingkat PDB maupun konsentrasi industri, jarak antara pulau Jawa dengan pulau-pulau Indonesia lainnya justru telah menjadi semakin jauh. Walaupun tekad pemerintah untuk mengatasi masalah ini tidak perlu diragukan, namun dilihat dari segi hasilnya, andaikata tidak akan disebut memprihatinkan, jelas masih jauh dari menggembirakan. Oleh karena itu di masa-masa mendatang, usaha pemerataan pembangunan antardaerah perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Sedangkan berbagai masalah yang menghambat proses pemerataan pembangunan antardaerah ini, perlu dikaji lebih lanjut.

Daftar Bacaan

1. Indonesia, Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia 1985.
2. Indonesia, Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
3. A. Madjid Ibrahim d.k.k., "*Regional Development Seminar*" PPN-FEUI-Bappenas, Jakarta, 1973.
4. Alfian Lains, "Pembangunan Daerah di Indonesia", dalam Anwar Nasution (ed), *Peluang dan Tantangan Pembangunan Indonesia Sampai 1989*, Sinar Harapan, Jakarta, 1985.
5. Alfian Lains, "Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru", *Prisma*, No. 4 April 1985.
6. Amdt, H.W., "Regional Income Estimates", *BIES*, Vol. IX No. 3, Nopember 1973.
7. Atar Sibero, "Peningkatan Kemampuan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah", *Prisma*, No. 12 Desember 1985.
8. Hendra Esmara, "Regional Income Disparities", *BIES*, Vol. XI, No. 1, 1975.
9. Iwan Jaya Azis, "Pengembangan Pembangunan Daerah di Indonesia", dalam Mohamad Arsyad Anwar (ed), *Prospek dan Permasalahan Ekonomi Indonesia 1985/1986*, Sinar Harapan, Jakarta, 1985.
10. Iwan Jaya Azis, "Pembangunan Daerah dan Aspek Alokasi Investasi Antardaerah", *Prisma*, No. 5, Mei 1985.
11. JB. Kristadi, "Masalah Sekitar Peningkatan Pendapatan Daerah", *Prisma*, No. 4, April 1985.
12. Kerr, Alex, "Regional Income Estimation in Indonesia", *EKI*, Vol. XXI, No. 3, September 1973.
13. Mubyarto, "*Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan*", Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
14. Prayudi Atmosudirdjo, "*Sejarah Ekonomi Indonesia*", Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan ke-IV, 1983.
15. Richardson, Harry W., "*Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*", LPFE-UI Jakarta, 1977.

16. Rustian Kamaluddin, "*Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Daerah*", Galia Indonesia, Jakarta, 1983.
17. Sadono Sukarno, "*Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*", LPFE-UI, Jakarta, 1985.
18. Sadono Sukarno, "*Ekonomi Pembangunan; Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*", Bima Grafika, Cetakan III, (tanpa kota), 1982.
19. Syafrizal, "Perencanaan Pembangunan Daerah", *Prisma*, No. 4 April 1985.
20. Syafrizal, "Pola Kebijakan Pembangunan Wilayah di Indonesia: Suatu Gagasan", *EKI*, Vol. XXXII, No. 3, September 1984.
21. Sritua Arief dan Adi Sasono, "*Indonesia: Ketergantungan dan Keterbelakangan*", Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta, 1981.